

## Peranan Jawara dalam Revolusi Kemerdekaan di Bekasi 1945-1949

Gita Artika Ningtyas<sup>1</sup>, Dwi Mulyatari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat  
Email: gita.artika@ui.ac.id<sup>1</sup>

### Abstrak

Rekam jejak Jawara di Bekasi, telah ada sejak masa kolonial. Keberadaan Jawara di tanah partikelir di Bekasi saat itu menjadi penting, bagi para tuan tanah. Berkat kepiawaiannya dalam ilmu bela diri, serta ilmu kekebalan yang dimilikinya, para tuan tanah menempatkan Jawara sebagai kepala keamanan dan pengawas para pekerja perkebunan, serta penarik pajak. Karena diberikan akses kepercayaan dari tuan tanah, Jawara dalam menjalankan tugasnya kerap kali melakukan tindakan sewenang – wenang kepada penduduk yang tidak ingin membayar pajak, hingga merampas harta benda, sehingga dikemudian hari menimbulkan perlawanan dari penduduk. Seiring perjalanan waktu, Jawara yang semula dipandang keji berubah peran menjadi agen penggerak di masa revolusi kemerdekaan 1945- 1949. Kehadiran tokoh lokal Haji Djoleh, Camat Nata, Pak Macem, tidak dapat dikesampingkan dari historiografi lokal mereka memiliki peran yang besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Bekasi Oleh karena itu, permasalahan yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana peranan Jawara dalam revolusi kemerdekaan di Bekasi Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah tahapannya, meliputi heuristik, kritik, interpretasi, historiografi.

Kata Kunci: Peran; Jawara; Bekasi; Masa Revolusi.

### Abstract

Jawara's track record in Bekasi has existed since colonial times. Jawara's presence in the land in Bekasi at that time became important, for the landlords. Thanks to his expertise in martial arts, as well as his immunity, the landlords placed Jawara as the head of security and supervisor of plantation workers, as well as a tax collector. Because they were given access to trust from landlords, Jawara in carrying out their duties often carried out arbitrary actions to residents who did not want to pay taxes, to the point of depriving them of property, so that in the future it would cause resistance from the residents. Over time, Jawara, who was originally seen as heinous, changed his role as a driving agent during the independence revolution of 1945-1949. The presence of local figures Haji Djoleh, Nata Sub-district Head, Pak Macem, cannot be excluded from local historiography, they have a big role in the struggle to maintain independence in Bekasi Therefore, the problem posed in this article is how the role of Jawara in the independence revolution in Bekasi The writing of this article uses the historical method of its stages, including heuristics, criticism, interpretation, historiography.

Keywords: Role; Jawara; Bekasi; Revolutionary Period.

## A. Pendahuluan

Sejarah keberadaan Jawara di Bekasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan tanah partikelir di Batavia dan Ommelanden, percampuran berbagai kelompok telah memunculkan pertumbuhan dan peluang ekonomi yang modern, seperti hasil pertanian untuk pasar dunia, bisnis, perluasan infrastruktur, dan peralihan feodalisme ke bentuk kepemilikan modern, Ommelanden Batavia juga memiliki keistimewaan dalam berbagai sudut pandang karena daerah tersebut memberlakukan ketentuan-ketentuan bagi orang-orang Eropa yang diberikan akses untuk memiliki tanah. Oleh karena itu, pemerintah Ommelanden ditentukan dengan munculnya tanah-tanah swasta (Reid, 2011).

Ketika pemerintahan Gubernur Jenderal J.P. Coen, telah menjadi penggerak sistem tanah-tanah swasta di sekitar ibukota Batavia Pada awalnya tanah-tanah ini bertujuan untuk perlindungan kota. Namun, pemerintah kemudian menjual tanah kepada swasta untuk mengisi kas pemerintah Coen menetapkan bahwa halaman yang ditelantarkan beserta tanaman-tanamannya dapat diberikan sebagai suatu tanah pinjaman, dan sebagian hasil tanahnya harus dibayarkan kepada VOC. Pada masa VOC para pemilik tanah merupakan pegawai petinggi VOC, yang memandang kepemilikan tanah sebagai investasi. Karena mereka memiliki kedudukan di VOC, mereka dengan mudah membeli secara kredit. Namun, tidak keseluruhan dilakukan dengan cara seperti itu, ada juga pembagian tanah-tanah yang dilakukan secara cuma-cuma, artinya hanya sebagai bayaran atau tanda jasa yang diberikan kepada kompeni. Hal ini memiliki perbedaan yuridis secara halus yang pada praktiknya melegalkan orang Eropa memiliki tanah (Stibe, 1927). Soal kepemilikan tanah, para tuan tanah diberikan hak istimewa, seperti: menarik *Contingent* atau pajak tanaman tertentu dengan luas areal tanah dan mengerahkan penduduk sebagai tenaga kerja rodi atau *heerendiensten*, mengangkat dan memberhentikan pejabat setempat dan memberi gelar kepada mereka, seperti *majoor* kepala juragan dan lain sebagainya, serta memberi upah kepada mereka. Hak-hak penguasaan tanah tersebut berlaku dalam jangka waktu yang lama Untuk mengawasi tanah tersebut para tuan tanah mengangkat pembantu dekatnya yang disebut dengan Potia atau *lands opziener*. Potia biasanya adalah keturunan Cina yang diangkat oleh tuan tanah. Potia memiliki tugas mengawasi para pekerja serta mewakili tuan tanah apabila sedang tidak ada di tempat. Kemudian dari kalangan pribumi yang menguasai wilayah setingkat kecamatan dinamakan demang, demang memiliki fungsi yang sama dengan

Potia, hanya yang membedakan dengan Potia. Demang diangkat oleh Residen dan digaji oleh tuan tanah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Demang dibantu oleh para kepala kampung, seorang amil, Pancalang (pegawai politik desa), seorang Kabayan (pesuruh desa), dan seorang ululu (pengatur perairan) dan berikutnya Jawara, maka dengan terpilihnya mereka bagi tuan tanah diharapkan mampu mengatur segala kebijakan dalam lingkungan tanah partikelir dengan baik.

Seiring berjalannya waktu para tuan tanah bersama anak buahnya termasuk Jawara mulai terlihat perilaku buruknya mereka, kerap merampas harta benda penduduk yang tidak mampu membayar pajak atau hutang yang disebabkan beban bunga yang tinggi serta pungutan liar yang dilakukan oleh para juragan dan Jawara Hal ini membuat penduduk semakin miskin. Rupanya di tanah yang subur ini para tuan tanah kapitalis mengeksploitasi penduduknya dibandingkan menyejahterakan sedangkan pejabat pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan tuan tanah daripada masyarakatnya. Sehingga muncul keresahan sosial di Bekasi, keresahan tersebut memuncak di kalangan penduduk (Margreet, 2018).

Seperi dalam kasus Pemberontakan Petani di Bekasi pada tahun 1913 yang merupakan bentuk Gerakan protes atas ketidakpuasan masyarakat petani akibat penguasaan tanah partikelir oleh para tuan tanah, Penindasan yang dilakukan oleh para tuan tanah dan Jawara terhadap masyarakat tetap tak terkendali. Pihak aparat keamanan pun ternyata bukan melindungi rakyat, melainkan memihak pada kepentingan tuan tanah dan pihak kompeni. Dengan terciptanya kesenjangan sosial ini maka muncul banyak pelaku kriminal. Ada yang kriminal murni, yakni kriminal yang menjadikan siapa saja sebagai objek kejahatan yang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Ada juga pelaku kriminal yang disebut dengan bandit sosial, yakni bandit yang menjadikan objek kriminalnya adalah pihak tertentu dan hasilnya tidak dimakan sendiri, melainkan diberikan ke masyarakat. Jenis bandit ini memiliki kesadaran politik ekonomi bahwa terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan keberadaan Jawara telah berlangsung lama dalam sejarah Indonesia, terhitung sejak masa kolonial. Pada masa itu, Jawara digunakan sebagai alat kekuasaan oleh penguasa. Menurut Bahasa sunda Jawara diartikan sebagai anggota masyarakat yang sangat berpengaruh dan di hormati di kampungnya.

Dalam masyarakat Betawi Jawara dikenal sebagai ahli silat, yang tidak pernah “menjual” kemampuannya. Tetapi bersedia “membeli” kepada siapapun yang mau menjual. Pemahamannya seorang jagoan tidak akan menunjukkan kemampuan dirinya, tetapi jika ada Jawara yang ingin *meladeni bertarung* kejagoannya pasti akan dilayani. Selain itu, menurut Sartono Kartodirjo, Jawara pada umumnya identik dengan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan suka membuat keresahan (Yulita, 2007).

Berangkat dari penjelasan di atas, artikel ini memfokuskan peranan Jawara dalam masa revolusi kemerdekaan, sepanjang tahun 1945-1949 merupakan masa perjuangan atas nama ‘*Kedaulatan Rakyat*’. Pada masa ini, para pemuda dan Jawara mengintimidasi, menculik dan membunuh para pejabat pemerintahan, kepala-kepala desa, serta anggota-anggota kepolisian yang pro-Belanda kondisi tahun tersebut dikatakan masa gejolak yang terjadi di berbagai daerah tak terkecuali di Bekasi sebagai daerah perjuangan. Para Jawara Bekasi tumbuh semakin solid dalam melakukan konsolidasi dengan sejumlah pemuda nasionalis untuk menggerakkan massa dalam rangka mendukung kemerdekaan di lapangan Ikada. Hal tersebut berfungsi untuk mengumumkan kepada rakyat luas bahwa Indonesia telah diproklamasikan dan memberikan penegasan bahwa pemerintah Indonesia masih ada, perjuangan yang dilakukan rakyat Bekasi karena mereka ingin merdeka. Bebas mengatur negeri sendiri, tidak ingin diperintah oleh penguasa asing dalam hal ini Belanda. Keinginan ini bukan hanya milik segelintir individu saja, melainkan semua orang di semua daerah, tak terkecuali para Jawara. Perannya memberikan makna dan kesan bahwa tak selamanya tindakan Jawara memiliki konotasi negatif. Ada Jawara yang sangat berkontribusi besar bagi negeri ini. Disini terlihat bahwa Bekasi adalah daerah yang sangat diperhitungkan. Selain wilayah yang dekat dengan Jakarta, banyak elemen pejuang yang berada di Bekasi.

Seperti di Bekasi Jagoan disebut sebagai Jawara, sebutan untuk orang yang berpengaruh dan pemberani. Dalam struktur masyarakat Bekasi Jawara menempati posisi yang terhormat, karena keberaniannya yang diimbangi dengan jiwa patriotisme, segala cara dilakukan para Jawara seperti: Haji Darip, Haji Djoleh, Camat Nata Pak Macem dan KH Noer Ali. Mereka memegang andil besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di wilayah kekuasaannya, yaitu Bekasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka dengan hal ini penulis mencantumkan beberapa pertanyaan untuk menelusuri peran mereka semasa perjuangan revolusi kemerdekaan. Diantaranya: 1) Bagaimana kedudukan Jawara dalam struktur masyarakat di Bekasi?; 2) Mengapa para Jawara mengambil peran dalam revolusi Indonesia?; dan 3) Bagaimana dampak keikutsertaan Jawara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di Bekasi? pertanyaan tersebut diajukan dalam penulisan artikel ini sebagai usaha melihat perkembangan sejarah Bekasi dari perspektif Jawara. Selain rumusan masalah yang diajukan, penulis juga menggunakan beberapa literatur penelitian terkait dengan keberadaan Jawara, diantaranya:

Karya Anwar Setiawan *“Identitas Ganda Bekasi: Suatu Transformasi dari Masyarakat Tradisional menuju Masyarakat Modern”*, (2003). Dalam penelitian ini pembahasan awal dimulai dari kondisi geografis Bekasi saat itu yang merupakan bagian dari wilayah Jatinegara. Selain itu, dijelaskan juga tentang perubahan masyarakat Bekasi dari tradisional menuju modern, dan yang terpenting dalam karyanya juga dibahas sedikit mengenai keberadaan Jawara yang dilihat dari aspek struktur masyarakat Bekasi itu sendiri. Penelitian ini sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam penulisan artikel ini.

Selain itu, ada pula Skripsi Ali Anwar dari Jurusan Ilmu sejarah FIB UI yang berjudul *Gerakan Protes Petani di Bekasi* yang terjadi pada tahun 1913. Dalam skripsinya tersebut, penulis menjaskan tentang bagaimana terjadinya gerakan protes yang didasari oleh ketidakpuasan petani akibat dari penguasaan tanah partikelir. Berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan para tuan tanah dan aparatnya membuat para petani semakin terhimpit. Kondisi seperti ini yang membuat para petani meminta kebijaksanaan kepada penguasa saat itu untuk memperbaiki kebutuhan sehari-hari. Namun, langkah tersebut tidak berarti apa-apa dan rakyat hanya menerima nasib apa adanya. Skripsi ini sangat menarik untuk di jadikan rujukan dalam topik penelitian ini karena untuk melihat sejauh mana peran Jawara di tanah partikelir.

Kemudian karya H.S Suhaedi dalam tesisnya pada Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Indonesia 2003 dengan judul *Jawara; Kajian Sosial-Historis Tentang Mobilitas Sosial Jawara* yang meneliti Jawara melalui peran sosial dalam tinjauan sejarah di Banten. Tesis menarik untuk di jadikan rujukan penulisan makalah proyek akhir karena memiliki persamaan dalam membahas

Jawara. Hanya saja yang membedakan tesis tersebut sangat kuat dengan pendekatan sosiologi.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan mengenai Jawara, penulis melihat masih banyak peneliti, sarjana yang belum mengkaji peranan Jawara. Hal yang menarik dari revolusi kemerdekaan tidak lengkap jika tidak membahas peranan kelompok Jawara pada masa itu kekuatannya sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Adapun perbedaan lain dari penelitian sebelumnya, penulis melihat masih belum dibahas secara tuntas mengenai peranan Jawara khususnya di Bekasi, maka dengan kekurangan tersebut, penulis mengkaji kembali peranan Jawara secara utuh. Topik ini sangat penting ditulis karena keberadaan Jawara dalam perjuangan bukan hanya dikenal dalam dunia pengacau. Namun aksi Jawara dalam konteks masa revolusi memberikan dampak yang besar dalam perubahan tatanan sistem pemerintahan lama ke sistem pemerintahan yang baru sekaligus menjadi catatan sejarah yang penting dalam penulisan sejarah Indonesia. Mengingat masih sedikit yang mengkaji, dikarenakan peneliti lainnya kurang memiliki gambaran seperti apa yang terjadi kala itu tepatnya di Bekasi diharapkan, kajian ini dapat menambah pengetahuan dari kekurangan sejarah lokal dan sejarah sosial.

Adapun Alasan lain, penulis mengangkat tema ini karena dalam penulisan sejarah nasional hanya memfokuskan pada peranan elite politik atas saja, sebaliknya peranan orang-orang kecil dalam perihal ini Jawara termajinkan peranannya. Padahal peran Jawara sangat besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perlu dipahami dalam penulisan artikel ini tidak hanya menarangkan peran Jawara dalam revolusi kemerdekaan saja tetapi mengkaitkan apa yang terjadi di masa lalu serta dampak yang dihasilkan dari peran para Jawara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan

## B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah, sebagai upaya menguji keautentikan dari rekaman peristiwa masa lalu yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik artikel tersebut. kemudian ditulis dalam bentuk analisis deskriptif dan naratif (Louis Gottschalk, 1986)

Heuristik proses pencarian data dalam proses ini peneliti berusaha mengumpulkan sumber sejarah yang berhubungan dengan peranan Jawara

yang nantinya dijadikan rujukan dalam penulisan, seperti dokumen, buku yang didapatkan dari ANRI, arsip yang berjudul Peristiwa Tamboen dan Karawang yang membahas mengenai kekisruhan Laskar Rakyat dengan Jago. Dalam salah satu laporan yang ditemukan, penulis menemukan keberadaan dari salah satu Jawara, itu artinya memang ada aksi yang dilakukan oleh Jawara pada masa itu.

Penelitian ini juga didukung satu sumber tercetak resmi milik pemerintah kolonial berupa dokumen Nationalarchieff Arsip tersebut digunakan sebagai sumber untuk menyusun penelitian ini karena memuat berbagai informasi mengenai keberadaan Haji Djoleh, Camat Nata, dan Pak Macem. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder lainnya yaitu koran sezaman yang memuat banyak informasi lebih detail tentang keberadaan Haji Djoleh, Camat Nata, dan Pak Macem. Sumber ini, penulis dapatkan dari layanan koran digital yang dapat di akses secara online melalui *Delpher*. Kemudian dalam penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara dengan salah satu kalangan keluarga pak Macem dan anak dari Camat Nata (Daliman, 2012), sampai pada cucu dari Haji Djoleh. Tujuan wawancara ialah untuk menggali pengalaman narasumber dalam sejarah Bekasi yang berkaitan dengan Jawara. Sejauh ini penulis melakukan telaah sumber sejarah berdasarkan dokumen atau laporan. Sumber yang paling banyak sudah berbentuk sumber salinan dan untuk dikatakan sebagai sumber primer sangatlah minim. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sumber sejarah menjadi turunan, karena kondisi fisik dokumen yang tidak memungkinkan, tulisan yang sudah tidak terbaca.

Selain kedua sumber tersebut, data penelitian ini juga mengacu dari sejumlah buku yang terkait dengan topik penelitian ini baik menyangkut sejarah Bekasi maupun kehidupan para Jawara. Semisalnya: Karya Robert Cribb *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949*. Buku ini menjelaskan peran dunia kriminal dalam perjuangan revolusi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, buku ini tidak hanya menjelaskan kedudukan para jago dalam masa revolusi tetapi juga membahas kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sehingga penulis rasa buku ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga merujuk pada buku karya Anton E Lucas yang berjudul *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi Dalam Revolusi*, buku ini menjelaskan mengenai revolusi

kemerdekaan di tiga daerah, pada tahun 1945. Peristiwa ini dianalisa dari beberapa segi, dan akan memberikan makna yang lebih mendalam pada revolusi Indonesia secara keseluruhan.

Patokan yang pertama bisa kita lihat untuk memahami kejadian revolusi pada tahun 1945 lihat pada perubahan sebelumnya, yaitu dalam bidang ekonomi dan politik sebelum perang dunia kedua. Hal ini harus dikaitkan juga dengan perubahan ekonomi akibat masuknya modal asing (Eropa) di abad 19 dan sistem tanam paksa yang pengaruhnya besar pada kehidupan petani, timbulnya para golongan elite birokrat (pangreh praja) maupun kepala desa yang sering bertindak sebagai pejabat kapitalis, seperti dalam soal sewa tanah, penarikan pajak dan *corvee* (kerja paksa), yang akan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat kecil. Ciri ciri sosial dimasa revolusi tiga daerah antara lain pembagian kekayaan, pengusiran atau penggeseran elite lama-kepala desa, camat, wedana yang dianggap antek Belanda dan Jepang, belum lagi mereka selalu bertindak kekerasan kepada rakyat. Kondisi seperti inilah yang membuat rakyat bangkit untuk melakukan revolusi. Kehadiran kaum kiri dalam kancah sejarah revolusi Indonesia merupakan elemen penting dalam gerakan peristiwa tiga daerah sangat memperlihatkan sekali kelompok-kelompok yang bergerak pada waktu itu, diantaranya golongan kiri, golongan agama dan militer. Tidak hanya itu gerombolan bandit juga dibahas secara dalam dibuku ini, penulis rasa buku ini sangat cocok untuk dijadikan rujukan penulisan makalah proyek akhir ini karena sangat berhubungan dengan topik yang sedang penulis kaji.

Setelah sumber terkumpul, tahapan berikutnya ialah melakukan kritik sumber. Kritik dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut, disebut dengan eksternal. Sedangkan, penyeleksian informasi yang terkandung dalam sejarah, dapat dipercaya atau tidak, dikenal dengan kritik internal. Di sini penulis melakukan kritik ekstern pada koran *Kedaulatan Rakyat, Merdeka*, dilakukan dengan cara melihat kondisi fisik dari keaslian koran tersebut. Kedua, koran ini masih terbukti asli dilihat dari warna kertas, tulisan yang masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan dan tidak ada perubahan dari bentuk fisiknya. Bisa dikatakan asli dan masih tersimpan rapih dalam Perpustakaan Nasional. Untuk koran *Nieuwsgier* dan *Nieuw Courant* kualitas fisik koran tersebut masih dikatakan asli

dan tersimpan dalam database delpher.

Setelah dilakukan kritik eksternal, Langkah berikutnya adalah kritik internal dengan menguji kredibilitas dari suatu sumber terkait dengan isi, konten, dari sumber tertulis. Mengenai kebenaran (*the truth*) itu sendiri merupakan suatu masalah yang tidak pernah tuntas dibahas. Kebenaran yang dicerna seseorang terhadap suatu fenomena banyak bergantung pada sudut pandang yang banyak dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama dan faktor lainnya yang tidak dapat tersebutan. Proses kritik internal dimulai dengan menguji kemampuan informan dalam memberikan penjelasan terkait dengan peristiwa. Pada proses ini, penulis mengamati kemampuan fisik informan dalam menjelaskan peristiwa secara kronologis. Ada beberapa yang diperhatikan dari keterangan informan, ketajaman daya berpikir sangat mempengaruhi kualitas observasi terhadap peristiwa atau gejala-gejala peristiwa yang diamati untuk menghindari subjektifitas penulis melakukan interpretasi, secara metodologi interpretasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian sejarah dengan memahami sumber yang menerangkan latar belakang dari masing-masing Jawara untuk mendapatkan maksud dari tindakan yang dikehendaki dari para Jawara. Sehingga dari proses tersebut dapat diperoleh pemahaman yang tepat. Setelah dilakukan interpretasi dengan tepat langkah berikutnya historiografi (penulisan sejarah) yaitu proses rekonstruksi masa lampau dalam bentuk tulisan sejarah yang dapat di pertanggungjawabkan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui sumber yang telah di analisis kemudian di tafsirkan secara logis, dan jelas. berlandaskan pada teori dan metodologi sejarah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### a. Latar Belakang Munculnya Jawara di Bekasi

Keseluruhan tanah di Bekasi adalah tanah-tanah sawah yang luasnya mencapai beribu hektar. Di daerah Setu-Lemahabang (sekarang ini kabupaten Bekasi). Selain terdiri atas persawahan juga terkenal sebagai tanah perkebunan yang banyak menghasilkan buah-buahan. Perkebunan karet banyak terdapat di daerah Cakung, Pondok Gede, dan Tambun. Bagian utara distrik Bekasi merupakan daerah rawa-rawa yang sulit ditanami. Tanah rawa tersebut banyak diberikan kepada penduduk pribumi dengan membayar sewa cukai sebanyak 20 % dari hasil panen kepada tuan tanah yang berada di wilayah kepemilikannya

Mengenal sistem penguasaan tanah di Bekasi, dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tanah dengan hak guna usaha dan tanah kongsi. Tanah hak guna adalah tanah yang digunakan untuk pertanian. Di tanah hak guna ini, penduduk diharuskan membayar pajak yang telah ditentukan oleh tuan tanah. Sedangkan tanah kongsi terdiri atas empat kategori- *pertama*, tanah yang diusahakan sendiri oleh tuan tanah partikelir, dengan biaya yang ditanggung sendiri. *Kedua*, tanah yang dipergunakan sendiri oleh tuan tanah partikelir. *Ketiga*, tanah yang belum maksimal digunakan untuk musim panen. *Keempat*, tanah belukar dan tanah hutan yang belum digunakan.

Penguasaan tanah di Bekasi sangat di dominasi oleh orang-orang Cina dengan cara sistem sewa tanah kepada pemerintah. Apabila masa sewa telah habis maka dapat diperpanjang beberapa tahun. Para tuan tanah sangat berkuasa penuh, dan dapat di ibaratkan sebagai “Raja” termasuk kebijakan pemerintah dalam urusan tanah sudah pasti tuan tanah diuntungkan seperti Hak *eigendom* yang artinya pemilik tanah partikelir memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri. Rakyat yang menghuni di tanah partikelir harus tunduk kepada peraturan pemilik tanah partikelir.

Pegawai tuan tanah dari kalangan pribumi yang menguasai wilayah setingkat kecamatan adalah Juragan. Dia menguasai sejumlah kemandoran atau kampung. Kepala kampung disebut Mandor. Juragan dan Mandor dipilih dan digaji oleh tuan tanah atas dasar persetujuan residen. Sedangkan Centeng merupakan anak buah dari mandor, juragan, atau tuan tanah langsung yang bertugas untuk menjaga keamanan. Mandor bertugas pemungut pajak dari penduduk, mengatur jam kerja rodi warga, memelihara ketertiban umum. Selain itu, juga sebagai penghubung antara tuan tanah dengan penduduk yang tinggal di wilayah tuan tanah.

Hal ini tidak terlepas dari peran para pembantu tuan tanah, karena bagi tuan tanah yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka segala cara dilakukan oleh para tuan tanah. Lalu pengawasan dari pemerintah terhadap tuan tanah dan anak buahnya sangat lemah sehingga dimanfaatkan dengan baik oleh mereka. Praktik sewenag-wenang yang dilakukan oleh tuan tanah dan para pembantunya menimbulkan kebencian dan perlawanan di kalangan petani, itulah yang membuat daerah partikelir terus bergejolak.

Pemilihan juragan dan mandor berdasarkan potensi mereka dan pengaruhnya terhadap

masyarakat. Untuk pengaruh dan wibawa biasanya dipengaruhi oleh kekayaan yang dimiliki atau berdasarkan garis keturunan dari tokoh sebelumnya. Untuk menjadi seorang Jawara, tidak cukup hanya mengandalkan ahli dalam perkelahian, tetapi juga harus pandai dalam ilmu kebatinan atau ilmu mistik karena serangan dari pihak lawan tidak hanya fisik, tapi juga dalam serangan gaib. Soal gaya berpakaian, seorang mandor identik memakai celana panjang berwarna gelap, berpeci hitam. Pakaian dan perlengkapan sejenis yang melekat pada seorang Mandor. Sementara, untuk mempertegas kesan keji di wajah, Mandor tuan tanah memiliki kumis berbentuk tajam bagaikan tanduk kerbau. Fungsi pakaian yang melekat pada tubuh Mandor itu harus pula dilihat bukan hanya sebagai pelindung tubuh tetapi pakaian yang memberikan makna sosial.

Keberadaan Jawara di Bekasi sudah ada sejak Belanda berkuasa di Indonesia. Pada masa itu, Jawara atau mandor ditempatkan sebagai alat kekuasaan para Tuan tanah untuk mengawasi tanah dan sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Dalam kegiatan tersebut para mandor menggunakan cara-cara diluar batas kemanusiaan, hal yang sangat wajar dilakukan mengingat mandor atau Jawara di percaya para tuan tanah untuk melindungi kepentingan. Seperti kasus para tuan tanah dan pengikutnya mengambil paksa kepada rakyat yang tidak mampu membayar utang dan pajak dikarenakan beban bunga yang terlalu tinggi dan maraknya pungutan liar belum lagi jika ada suami yang tersangkut utang dan kebetulan memiliki istri atau anak gadis cantik maka para mandor tidak segan-segan mengambil paksa. Tindakan yang dilakukan para mandor akan menimbulkan perlawanan rakyat (Cribb, 1990).

Bagi masyarakat Bekasi Jagoan disebut Jawara, sosok orang yang kebal dan dianggap pendekar. Pada masa pemerintahan kolonial jagoan dikenal dengan istilah “Buaya” yang setara dengan “Pencoleng” berkonotasi suka mengambil hak orang dan selalu membuat keresahan. Seiring perjalanan waktu makna Jawara mengalami pergeseran dari yang terkesan keji menjadi terkesan baik, hal tersebut tidak terlepas bagaimana peran Jawara dalam memperjuangkan rakyat dari situlah masyarakat segan dan menghormatinya (Fauzi, 2010).

#### b. Kondisi Bekasi pada Masa Revolusi

Proklamasi kemerdekaan Indonesia di mata Belanda hanya bersifat pernyataan sepihak saja Oleh karena itu Belanda menyusun strategi untuk

menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia, bahkan orang-orang Belanda yang berada di Jakarta tidak percaya munculnya Republik ini tidak peduli dengan perubahan yang terjadi, mereka membentuk kelompok orang Belanda dengan skala anggota yang sangat besar dan berusaha memulihkan pola kehidupan dari zaman sebelum perang. Orang-orang Ambon dan Indo yang mengaku sebagai penjaga keamanan, berkeliaran di jalan-jalan untuk melakukan patrol-patroli (Tomas, 2022)

Masih dalam suasana proklamasi, sejak lama rakyat Bekasi melakukan persiapan memperkuat diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di Tanah Air kita. Sejumlah pemuda dari Bekasi berbondong-bondong menuju Jakarta, dan menyebarkan informasi ke yang lainnya. Semangat mereka berkorbar. Luapan rasa tercampur dengan kekesalan yang terpendam cukup lama. Mereka begitu kesal dengan perilaku tentara Jepang. Tidak sedikit yang kemudian ditangkap dan dibunuh oleh masyarakat. Warga etnis Cina juga menjadi sasaran penjarahan. Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan peralihan kekuasaan dari Hindia Belanda ke Jepang. Mereka kembali menjadi sejumlah korban perampokan. Selang 1 bulan proklamasi pada hari sabtu tanggal 19 September mulai subuh massa sebanyak 150.000 dari Jakarta, Cengkareng, Bogor, Banten, Bekasi membanjiri Lapangan IKADA dalam keadaan siap tempur sambil berteriak MERDEKA (Dinas Sejarah Militer, 1975).

Dari Bekasi jumlah massa yang datang tidak dapat dihitung jumlahnya, mereka terdiri dari rombongan besar maupun rombongan kecil, tidak jarang terjadi pertempuran dan perkelahian dimana-mana tentara Jepang banyak terbunuh karena tusukan bambu runcing, tusukan keris bacokan golok dan tembusan peluru, Sehari sebelum rapat akbar di Lapangan IKADA, tokoh Angkatan Pemuda Indonesia (API) selaku panitia akbar datang ke Bekasi. Mereka menemui beberapa tokoh lokal untuk mendukung Republik Indonesia, dan diharapkan ikut memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Misalnya saja Wahidin Nasution dan Manaf Rono yang menuju ke Cibarusah dan melakukan kontak dengan Pak Macem. Rapat raksasa di Lapangan Ikada tersebut berfungsi untuk mengumumkan kepada rakyat luas bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamkan. Selain itu juga menegaskan dukungan dan kepercayaan penuh terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta ke seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 24 Agustus 1945, di Chequers

dekat London, Belanda dengan Inggris melakukan serangkaian pertemuan penting untuk membahas perihal penyerahan kekuasaan Indonesia yang telah dibersihkan oleh Inggris kepada Belanda melalui jalan NICA. NICA merupakan Lembaga resmi pelarian pemerintah Belanda di Australia pada 3 April 1944. NICA dipimpin oleh Dr. Hubertus J. Van Mook. Tugas utama mereka adalah membentuk persemaikuran di Hindia-Belanda dibawah kerajaan Belanda. Mengingat wilayah Indonesia sangat luas, Mounbatten membentuk *Allied Forces Netherland East Indie* (AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philips Christison (Sudrajat, 2015).

Kehadiran AFNEI yang awalnya disambut netral oleh pihak RI, tetapi diketahui AFNEI membawa sekelompok pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NICA membuat rakyat semakin curiga. Suasana awal kemerdekaan yang penuh ketidakstabilan pemerintahan begitu terasa dimana-mana. Penjarahan, perampokan dan pembunuhan menjadi hal biasa yang terjadi sehari-hari. Suatu hal yang wajar bahwa semua hal itu terjadi karena rakyat sudah sangat dendam dengan sikap penjajah. Namun tidak jarang juga ada yang memanfaatkan situasi kondisi untuk meraih keuntungan pribadi dan kelompoknya melalui aksi kriminal. Mengingat juga Bekasi dikenal dengan daerah yang sangat tinggi kriminalitas, dan aparat keamanan tidak berkutik (Akhmad Iqbal, 2010). Diperkirakan Belanda merekrut sejumlah besar sukarelawan dan segera melakukan wajib militer untuk pasukan KNIL. Secara total, hampir 220.000 pria dan beberapa ratus wanita bertugas di tentara gabungan Belanda; 160,000 (Gert Oostindie, 2018).

Berpuluh-puluh truk dan kendaraan lapis baja yang terdiri dari pasukan India dan Sekutu bergerak menuju Bekasi mendapat perlawanan dari penduduk dengan senjata mortir dan Meriam, pertempuran terus terjadi tanpa memadam siang dan malam. Korban dari kedua belah pihak berjatuhan semakin banyak (Kedaulatan Rakyat, 1946). Bertepatan dengan kondisi yang semakin tidak menentu pemerintah membentuk kesatuan pertahanan yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibentuk sejak 5 Oktober 1945. TKR ini merupakan terusan dari Badan Keamanan Rakyat yaitu suatu kesatuan pertahanan yang dibentuk secara otonom guna membantu perjuangan rakyat saat itu (Kahin, 2013).

Kondisi pemerintahan saat itu masih lemah, sehingga sangat wajar jika terjadi kekacauan terjadi dimana-mana. Pembunuhan dan penjarahan menjadi hal biasa. Tidak bisa disalahkan juga jika

rakyat berbuat aksi anarkis karena trauma akan penindasan yang dilakukan penguasa asing. Sebagai hukuman yang harus di terima oleh Jepang yang sudah kalah dari perang oleh sekutu, kemudian Belanda dan Sekutu bertahap masuk dan menguasai Indonesia. Akibatnya, Indonesia masuk kedalam ruang penjajahan kembali.

Insiden kali Bekasi muncul berawal ketika Jenderal Christison sebagai pimpinan *Allied Forces Netherland East Indies* memiliki tugas untuk mengembalikan para tawanan dan interniran perang Jepang yang berjumlah hampir 100 orang di Bekasi diangkut menggunakan kereta api yang berangkat melalui jalur darat. Di tengah perjalanan kereta diarahkan ke jalur buntu dan saat itu dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah tentara Jepang. Walaupun mereka menunjukkan kelengkapan dokumen, namun tetap tidak merespon dengan baik sehingga terjadi insiden mengerikan. Rasa trauma bercampur emosi atas perlakuan Jepang yang sangat keji menjadikan hal yang diperbuat di masa lalu harus di bayar mahal. Para pemuda yang tergabung dari Laskar menghabisi secara sadis para tentara Jepang dengan menggunakan senjata tajam seperti golok dan senapan. Setelah itu, mayat tentara dilempar ke kali Bekasi yang dalam sekejap berubah menjadi lautan darah. Insiden terjadi tepat pada tanggal 19 Oktober 1945 berselang sebulan setelah Proklamasi di bacakan (Endra, 2016).



**Gambar 1.** Monumen Tentara Jepang

Sumber: koleksi pribadi

Monumen tersebut secara simbolik memberikan pembelajaran sejarah yang berharga untuk masyarakat Bekasi saat ini. Penulis melihat bahwa insiden kali Bekasi merupakan hukum rimba: siapa yang berbuat jahat akan di balas dengan kejahatan pula. Bekasi adalah daerah yang tidak ingin di atur oleh penguasa asing dan sekaligus peringatan kepada musuh

Sepanjang Oktober dan November 1945, disejumlah daerah di Bekasi berbagai pertempuran yang sengit menjadi hal biasa. Sebab, Bekasi

merupakan pintu gerbang untuk masuk ke teritori Indonesia di sebelah timur Jakarta, khususnya untuk menuju Bandung, diakhir November 1945, serangan besar-besaran dari Sekutu secara serentak dari Barat, Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka mengepung pertahanan RI yang ada disepanjang Front hingga ke Kranji.

Perlu dipahami juga bahwa penegakkan kemerdekaan negara kesatuan pada awal revolusi memiliki caranya tersendiri. Pemerintah, sebagai pihak resmi yang mewakili rakyat, memilih berjuang dengan cara melakukan perundingan-perundingan baik dengan pihak sekutu maupun dengan pihak Belanda. Tujuan perjuangan dengan cara diplomasi ini lebih dititikberatkan pada pemeliharaan keamanan dan mencari dukungan dari dunia luar tentang keberadaan negara baru ini. Maka wilayah ini juga yang menjadi ajang perebutan oleh Belanda-Sekutu dan pihak Indonesia. Guna menghindari kekacauan, sebagai pemeliharaan perdamaian, Inggris selaku pihak sekutu berinisiatif dengan menjadikan Jakarta sebagai tempat perundingan. Kemudian Inggris meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengosongkan Jakarta dari semua kegiatan bersenjata. Sebagai bangsa yang menjunjung budaya menghormati, pemerintah Republik Indonesia mentaati perintah Sekutu. Walaupun memang terkesan lemah tetapi jika perhatikan secara luas perintah pengosongan sebetulnya merupakan strategi yang diciptakan pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia

Penentuan batas wilayah Jakarta dan Bekasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Walaupun garis batas telah ditetapkan pertempuran terjadi secara terus menerus tanpa henti. Masing-masing pihak dari pasukan Republik Indonesia atau Belanda dan Sekutu saling mengintai titik pertahanan. Akibat dari konflik tersebut garis pembatas yang telah ditentukanpun bergeser. Segala taktik pertempuran dilakukan para pejuang guna menghadapi serangan tiba-tiba dari musuh tak terkecuali para Jawara yang juga ambil bagian dalam domain aksi sehingga musuh tercengang oleh tindakannya (Merdeka, 1946).

### c. Sepak Terjang Jawara dalam Masa Revolusi Kemerdekaan

Bekasi sebagai daerah yang kerap terjadi pertempuran, kondisi yang tidak memungkinkan pemerintah Indonesia menciptakan kelompok atau organisasi bersenjata sebagai mesin perjuangan



mempertahankan negara (Gunawan, Bandarsyah & Fauzi, 2019). Keberadaan Laskar Rakyat yang juga di Bekasi. para anggota Laskar rakyat yang terdiri dari warga setempat yang memiliki keberanian dalam menghadapi musuh, perlu dipahami bahwa keberadaan Laskar saat itu juga memiliki afiliasi politik yang berbeda - beda, hingga diperjalannya mengalami disfungsi karena perbedaan paham dalam berjuang, tentu hal tersebut akan berdampak pada kelancaran berjuang, terjadi perbedaan pandangan mengenai integrasi badan perjuangan antara “*kelompok pasukan resmi*” dengan “*kelompok pasukan tidak resmi*” “Tujuan dari kebijakan sebetulnya untuk mewujudkan badan perjuangan yang lebih profesional (Ulf Sundhaussen, 1986).

Ciri spesifik Unsur perjuangan di timur Jakarta berada di bawah pengaruh garis keras, perlu diketahui juga bahwa daerah Bekasi sampai Karawang merupakan basis kekuasaan Jawara (Ali Anwar, 2015) Para pejuang tanpa melihat apakah berasal dari golongan kiri atau golongan kanan, para Jawara Haji Djoleh, Camat Nata, Pak Macem tidak dapat dikecualikan dari basis Laskar Rakyat. Mereka juga ikut “mengganggu” Belanda di titik garis keputusan antara Belanda dan Republik Indonesia. Ketika Presiden memerintahkan semua kesatuan bersenjata untuk bergabung menjadi satu kekuatan dengan Tentara Kesatuan Republik Indonesia, di waktu yang segenting ini pemerintah perlu mengambil tindakan yang cepat dalam rangka memelihara keselamatan negara. Langkah yang dilakukan pemerintah saat itu mendapat penolakan dari Laskar Rakyat di Bekasi Permasalahan tersebut di perkuat dalam laporan kementerian pertahanan dalam menanggapi bentrokan Laskar dengan TRI di Tambun. untuk memecahkan permasalahan tersebut maka diadakan perundingan yang dihadiri oleh para Menteri Negara dan Kepala kepolisian Negara saat itu (Arsip Nasional, 1947)

Menurut Giddens Jawara adalah “agensi” sebagai actor yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dari suatu kondisi yang berlawanan (Mukunda Lamsal, 2012). Tokoh yang memiliki pengaruh kuat dan menjadi motor penggerak di badan perjuangan adalah Haji Darip. Wilayah kekuasaannya meliputi Klender sebagai pusat sebelah utara hingga pulo gadung, sebelah barat hingga Jatinegara, sebelah Timur hingga Bekasi (Endra, 2016).

Tidak hanya Haji Darip, ada juga pasukan Haji Djoleh dan komplotannya yang dikenal sangat misterius. Mereka menganggap Belanda sebagai

musuh dan meneror mereka dalam beberapa bulan terakhir. Korbannya sangat banyak sehingga tidak mengherankan jika Djoleh dan anggotanya dikejar oleh milisi dan patroli polisi Belanda.

Kekuasaannya yang besar dapat melindungi para penyelundup. Ia menguasai tempat-tempat lalu lintas distribusi barang yang strategis seperti stasiun kereta api. untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Haji Djoleh tidak melakukannya sendiri Bersama Camat Nata, seorang tokoh berpengaruh di daerah Cibitung. Terlahir sebagai Nata bin Sedan, sosok kharismatik yang membuat orang-orang di sekitarnya mengikuti perintahnya, ia juga masuk dalam daftar berbahaya bagi dinas intelijen Belanda, tindakannya selalu membuat takut orang kulit putih. Menurut laporan, Pengadilan Militer Khusus Tambun saat ini sedang menyelidiki kasus 17 anggota yang beroperasi di Karawang dan Bekasi yang dipimpin oleh Camat Nata. kelompok ini bertujuan untuk membunuh semua orang Belanda dan untuk melakukan teror, mereka menggunakan senapan, karabin, pistol dan granat. (*Nieuwsgier*, 1948).

Berikutnya penguasa terkemuka yang berasal dari Citarik. Pada zaman kolonial Belanda Citarik merupakan Desa yang masuk dalam wilayah Distrik Cibarusah Kabupaten Bogor saat itu, dan sekarang masuk wilayah Cikarang Timur Pak Macem lahir dengan nama si'an yang diberi langsung oleh kedua orang tuanya di kenal sebagai sosok yang berwibawa, baik dan tegas . Siapapun yang berbicarannya padanya akan segan. sebab itulah dirinya seringkali di minta pendapatnya ketika akan melakukan pergerakan perlawanan terhadap musuh. Memang banyak juga yang meyakini Pak Macem ini memiliki ilmu supranatural yang dengan ilmu tersebut sering di pakai untuk membentengi pengikutnya dari bahaya tetapi bukan memperjualbelikan jimat, Ia memimpin gerombolan perampok yang terlatih dan berpengalaman. Namun dia bernasib sama dengan Haji Darip yang dituduh oleh Belanda, Belanda sedemikian rupa menciptakan propaganda hitam sebagai pembunuh karakter dengan mengangkat isu kanibalisme yang di anggap mampu menyerap kekuatan spiritual musuh. Karena selain tuduhan tersebut pak Macem tercatat dalam koran Belanda sebagai Jawara yang senantiasa selalu merampok dan dianggap sebagai pembunuh yang professional. Tuduhan tersebut dilancarkan kepada siapapun yang dianggap berbahaya. Bukan tanpa sebab semua tuduhan tersebut juga memang berdasarkan laporan-laporan dari orang-orang pribumi yang tidak suka dan selalu bersebrangan dalam hal pandangan. Hal lainnya terdapat oknum yang selalu

melakukan tindakan kriminal dengan mengatasnamakan orang-orang berpengaruh yang salah satunya Pak Maceem (Nieuwe Courant, 1949).

Mereka semakin gigih menjadi garda terdepan bergiliran dan Menyusun strategi untuk mencegah kembali penjajahan di Indonesia. Saat itu Jawa terbagi dua dalam tugas ada yang hijrah membantu perjuangan di wilayah lain ada pula yang masih bertahan di wilayah sendiri. Mereka terus berhubungan dengan jaringan luas dengan pemimpin nasional atau pemimpin lokal yang terorganisir pentolan kampung-kampung untuk memperkuat wilayah dari misi Belanda untuk merusak kedaulatan Indonesia dengan membentuk Republik Indonesia Serikat

Selain para Jawa peranan berikutnya yang sangat berpengaruh adalah Ulama. Kemampuan karismatik dengan segala tindakannya mampu menarik banyak pengikut karena para pengikut percaya bahwa pemimpin mereka sangat mumpuni dan memiliki kualitas luar biasa sehingga pengikutnya sangat setia pada pemimpinnya (Spencer, 1970). KH Noer Ali, Sosok ulama kharismatik. Perjuangan yang dilakukan kiai menggunakan cara Jihad, pendekatan institusi keagamaan seperti pondok pesantren sangat efektif untuk membangun jaringan intelektual, hingga menjunjung tinggi moral (akhlak) dan pembentukan karakter bagi para santrinya. (Samudra, 2020) Selain itu juga untuk menanamkan paham jihad cinta tanah air, mereka yang berjuang dibekali strategi perang dan tidak lupa itu juga membekali para pejuang (santri) dengan doa-doa agar menambah percaya diri dalam perjuangan (Suhaedi, 2006).

Dari penjelasan sepak terjang Jawa dalam revolusi kemerdekaan kita bisa melihat bahwa dalam hidup memang selalu ada dua sisi mata koin yang mana setiap orang akan melihat dengan pandangan berbeda, yang menyukai akan selalu menceritakan kebaikan sedangkan yang benci akan selalu memberikan cerita buruk terhadap setiap pribadi orang yang dimaksud.

#### d. Kondisi Bekasi pada tahun 1949

Perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk pemerintahan yang independen harus dibayar dengan mahal. serangkaian proses yang terjal harus dilewati bangsa ini Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada Desember 1949 membawa Republik Indonesia sangat terlihat jelas bahwa bagaimana Belanda menekan Republik Indonesia dalam perundingan tersebut bangsa ini harus berupaya keras lagi untuk melawan Belanda

yang ingin bertahan di Republik Indonesia. Hasil perundingan yang tidak membawa keuntungan membuat sejumlah daerah menyatakan sikap menuntut pembubaran negara federal. Dalam sebuah kasus di Bekasi, seluruh rakyat Bekasi tak terkecuali Jawa menginginkan Indonesia menjadi negara satu. Demi mencapai keinginan itu, segala upaya yang dilakukan Belanda selalu digagalkan oleh kekuatan rakyat. Tindakan kudeta berani dilakukan oleh para tokoh Bekasi salah satunya KH Noer Ali konseptor yang mententang keras pembentukan negara serikat (Lubis, 1992).

Selang beberapa bulan setelah konferensi Meja Bundar, tepat di tahun 1950 lewat upaya Plebisit, rakyat dari masing-masing daerah bersuara melawan ambisi Belanda dalam membentuk Republik Indonesia sebagai negara bawahan, dan ini ditunjukkan oleh Bekasi yang tidak ingin menjadi bagian dari Jatinegara. Dengan tekad yang kuat, diadakan rapat besar untuk membahas persiapan pemerintahan baru. Tetapi agenda tersebut tidak mendapat respon positif dari pemerintah RIS sehingga dianggap sebagai langkah yang tidak bermoral Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Bekasi pada waktu itu berdampak besar pada sistem pemerintahan saat itu berjalan (Toer, Toer, & Kamil, 2020).

Setelah beberapa hari pemerintahan federal di Jakarta resmi berakhir. Melihat masyarakat semakin menuntut maka Pemerintah Natsir mengambil sikap dengan mewujudkan pembentukan kesatuan yang kemudian dikenal dengan "Gagasan Integral". Lewat suara rakyat dari berbagai daerah mampu melemahkan Belanda dan terbukti di beberapa daerah mengklaim sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua yang berbau peninggalan kolonial di musnahkan. Dari peristiwa tersebut bisa diambil hikmah berbagai cara yang dilakukan rakyat Bekasi mendapat respon positif dunia. Berkat keberanian dan kegigihan Indonesia berhasil menjadi negara yang satu (Madinier, 2013).

#### D. Kesimpulan

Keberadaan Jawa di Bekasi tidak terlepas dari sejarahnya, Seperti di ketahui, Bekasi merupakan tanah yang subur dan produktif sehingga menjadikan wilayah tersebut menjadi tanah partikelir. Pengelolaan tanah dilakukan oleh penguasa asing yang dinamakan Tuan tanah. Mereka para tuan tanah bekerja bantu juga oleh Jawa atau Jago dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu tidak hanya menguasai tanah saja tetapi juga penduduk setempat harus patuh

terhadap perintah para tuan tanah dalam hal tersebut peran Jawara sangat dibutuhkan untuk mengendalikan keamanan dan pengawasan tanah dan hasil produksi. Berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber para Jawara dalam berkuasa, mereka sering memperlakukan orang-orang lemah saat itu sangat keji mulai dari mengambil hak dan memperlakukan mereka sebagai budak sehingga praktik sewenang-wenang tersebut menimbulkan perlawanan di kalangan penduduk.

Seiring perjalanan waktu Jawara yang selama ini dikenal pada masa partikelir terkesan keji mengalami pergeseran makna dan peran. Para Jawara pada masa revolusi kemerdekaan hadir sebagai motor penggerak perjuangan, sikap Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia hanyalah pernyataan sepihak dan belum ada pengakuan dari negara-negara lain. Menjadi peluang bagi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh Belanda mengundang reaksi perlawanan dari berbagai pihak termasuk para Jawara di Bekasi Haji Djoleh, Camat Nata, Pak Macem, Haji Darip sampai KH Noer Ali.

Mereka semakin gigih menjadi garda terdepan bergriya dan Menyusun strategi untuk mencegah kembalinya penjajahan di Indonesia. Saat itu Jawara terbagi dua dalam tugas ada yang hijrah membantu perjuangan di wilayah lain ada pula yang terus berhubungan dengan jaringan luas pemimpin nasional atau pemimpin lokal yang terorganisir dengan pentolan kampung-kampung untuk turut membantu perjuangan.

Perjuangan juga dilakukan dengan badan perjuangan pemerintah dengan membentuk badan perjuangan yang terdiri dari unsur kelompok ulama, kelompok pemuda dan banyak kelompok lain termasuk para Jawara ada didalam barisan Bambu Runcing untuk menyatukan kekuatan membentengi wilayah dari cengkraman penjajah. Selain badan perjuangan, cara lain yang digunakan Republik Indonesia dalam menghadapi Belanda yang terus berusaha memecah belah Indonesia adalah dengan jalan perundingan. Proses diplomasi yang diharapkan membawa kebebasan bagi bangsa Indonesia justru menjebak Republik Indonesia untuk menyetujui pemberntukan Negara Federal, sudah tentu konsep tersebut mengundang penolakan keras dari rakyat. Lewat Gerakan Plebisit rakyat menyatakan afiliasinya dengan negara kesatuan, dan terus berlanjut sampai dikeluarkannya resolusi suatu pencapaian terbentuknya negara kesatuan.

## E. Daftar Pustaka

### Pustaka Berupa judul buku:

- Akhmad, I. (2010). *Perang - Perang Paling Berpengaruh di Dunia*. Bangkit Publisher.
- Anwar, A. 2015. *KH Noer Alie, kemandirian Ulama Pejuang*. Yayasan Attaqwa.
- Arsip Nasional. 1947. *Laporan Peristiwa Kekacauan di Karawang dan Tambun oleh Laskar Rakyat Djakarta Raya*.
- Cribb, R. B. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Grafiti.
- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Fauzi, M. 2010. *Jagoan Jakarta dan Penguasaan di Perkotaan (1950-1966)*. Universitas Indonesia, Depok.
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Kusnawan, E. 2016. *Sejarah Bekasi: Sejak Peradaban Buni Ampe Wayah Gini*. Depok: Herya Media.
- Kahin, G., & Mc T.. 2013. *Nasionalisme & Revolusi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Lubis, A. B. 1992. *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Madinier, R. 2013. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*. Mizan.
- Margreet, V. T. (2018). *Batavia Kala Malam : Polisi, Bandit, dan Senjata Api*. Masup.
- Reid, A. 2011. *To Nation by Revolution: Indonesia in the Twentieth Century*. Singapore: NUS press.
- Suhaedi, H. S. 2006. *Jawara Banten : Kajian-Historis Tentang Mobiltas sosial Jawara*. Universitas Indonesia , Depok.
- Setiawan, A. 2003. *Identitas Ganda Bekasi : Suatu Transformasi dari Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern*. Depok: Universitas Indonesia.
- Stibe. 1927. Encyclopadie van Nederlands-Indie. Eesrte Deel. In *Gravenhage* . Martinus Nijhoff.
- Sudrajat, E. (2015). *Bogor Masa Revolusi 1945 - 1950: Sholeh Iskandar dan Batalyon 0 Siliwangi*. Komunitas Bambu.
- Sundhaussen, U. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945 - 1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Toer, P. A., Toer, K. S., & Kamil, Ediati. 2020. *Kronik Revolusi Indonesia 4 (1948)*. Kepustakaan Populer Gramedia.

**Pustaka Berupa Jurnal atau Majalah:**

- Gert. O. I. H., & J. V. (2018). The decolonization war in Indonesia, 1945-1949. *SAGE*, 25(2), 254-276  
<https://www.jstor.org/stable/10.2307/2650060>  
1.
- Gunawan, R., Bandarsyah, D., & Fauzi, W. I. 2019. *Chaos, moral decadence, and betrayal (satire in "di tepi kali bekasi" novel by Pramoedya Ananta Toer)*. *Litera*, 18(1), 71-91.  
<https://doi.org/10.21831/ltr.v18i1.21146>.
- Ilham, T. 2019. *Ulama dan Jawara dalam Dinamika Politik Lokal Banten*. *Jurnal Politikologi*, 7(1), 67-78.
- Lamsal, M. 2012. *The structuration approach of Anthony Giddens*. *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology*, 5, 111-122. .  
<https://doi.org/10.3126/hjsa.v5i0.7043>.
- Spencer, M. E. 1970. *Weber on Legitimate Norms and Authority*. In Source: *The British Journal of Sociology* (Vol. 21).  
<https://www.jstor.org/stable/588403>.
- Samudra Eka Cipta. (2020). Pesantren At-Taqwa Bekasi: Perubahan Pola Pendidikan dari Tradisional Menuju Modern (1980-2010). *PATTINGALLOANG*, 7(2), 238-239.  
<http://dx.doi.org/10.26858/jp.v7i2.13293>.
- Tomas Bagasgoro Tamba. (2022). Tjileungsi Pada Masa Perang Revolusi. *Patingalloang*, 9(3).<https://doi.org/10.26858/jp.v9i3.34488>.